

SURVIVAL ABILITY PONDOK PESANTREN DALAM DINAMIKA SOSIAL POLITIK INDONESIA: PONDOK PESANTREN RAUDLATUT THALIBIN, REMBANG, JAWA TENGAH

S. Izzah Afadha

izzahafadha00@gmail.com

Universitas Airlangga

ABSTRAK

Keberadaan pesantren di Indonesia ternyata mampu dipertahankan dari masa ke masa, melewati dinamika perkembangan dan perubahan kondisi sosial politik yang ada. Adanya relasi dan kemampuan survival antara pesantren dengan dunia politik sosial juga menjadi salah satu bekal pesantren untuk mempertahankan keberadaannya. Tujuan penelitian ini nantinya akan menjawab bagaimana kiprah dan kemampuan survival pesantren dalam dinamika sosial politik di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bertujuan agar penulis mendapat gambaran terkait objek penelitian, dan objek penelitian ini adalah Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin, Rembang, Jawa Tengah. Secara teoritis penelitian ini akan dianalisis dengan teori new institutionalism dan teori politik kultural. Keterlibatan pesantren dengan politik tidak lepas dari adanya peran kiai. Karena suatu lembaga akan dapat bertahan, jika dipegang oleh aktor yang tepat dan mendapat legitimasi yang kuat. Pesantren Raudlatut Thalibin sebagai suatu lembaga memiliki peran seorang aktor, yakni kyai sebagai pemimpin, pengelola dan motor penggerak suatu pesantren. Legitimasi juga dapat didapat pesantren melalui hubungan yang telah dibangun oleh kyai dengan masyarakat, melalui peran dan kiprah dari seorang kyai. Peran dari seorang kyai dalam kehidupan sosial politik tidak hanya diperankan secara struktural saja, namun juga kultural dengan dasar nilai-nilai sosial kultural yang ada didalam masyarakat. Sehingga kiprah dan kemampuan adaptasi Pesantren Raudlatut Thalibin didorong oleh pengaruh internal dan eksternal, yakni adanya peran kyai dalam mengelola pesantren dan juga peran kyai yang bersentuhan secara langsung dengan kehidupan sosial politik.

Kata Kunci: Pesantren, Kiai, Kemampuan Survival, New Institutionalism, Politik Kultural.

ABSTRACT

The existence of pesantren in Indonesia has been able to be maintained from time to time, they through the dynamics of development and changes in existing socio-political conditions. The existence of a relationship and adaptability between the pesantren and the world of social politics is also one of the provisions for the pesantren to maintain its existence. The purpose of this research will be to answer how they progress and the survival ability of pesantren in the socio-political dynamics in Indonesia. This study uses a qualitative method that aims to get the writer related to the object of research, and the object of this research is the Pesantren Raudlatut Thalibin, Rembang, Central Java. Theoretically, this research will be analyzed with the theory of new institutionalism and cultural politic theory. The involvement of pesantren with politics cannot be separated from the role of the kiai. Because an institution will be able to survive if it is held by the right actors and has strong legitimacy. The Pesantren of Raudlatut Thalibin as an institution has the role of an actor, namely the kyai as the leader, manager, and driving force of an pesantren. Legitimacy can also be obtained by pesantren through the relationships the kyai have built with the community, through the role and progress of a kyai. The role of a kyai in socio-political life is not only played structurally but also culturally based on socio-cultural values that exist in society. So that the progress and adaptability of the Raudlatut Thalibin Islamic Boarding School are driven by internal and external influences, namely the role of the kyai in managing the pesantren and also the role of the kyai who is in direct contact with socio-political life.

Keyword: Pesantren, Kiai, Survival Ability, New Institutionalism, Cultural Politics

PENDAHULUAN

Pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan yang ada di Indonesia, yang keberadaannya cukup tua dan tetap eksis di tengah dinamika perubahan yang ada. Lahirnya pesantren tidak hanya sekedar dalam rangka memfasilitasi kebutuhan masyarakat akan pentingnya pendidikan, melainkan juga bertujuan untuk menyebarkan ajaran agama Islam. Identitas akan keberadaan suatu pesantren pada awal perkembangannya hanya sebatas lembaga yang bertujuan untuk memberikan pembelajaran dan pendidikan berbasis agama Islam. Namun, dengan berjalannya waktu, keberadaan pesantren saat ini salah satu lembaga yang cukup banyak mengalami perubahan dalam dinamika masyarakat, sehingga definisi maupun esensi dari keberadaan lembaga pesantren yang awalnya merupakan hanya lembaga pendidikan agama Islam, mengalami modernisasi atau pembaharuan dalam segala aspek yang ada dalam lembaga pesantren. Walaupun pada hakikatnya eksistensi lembaga pesantren tetap berada pada tujuan dan fungsi awalnya yang asli. Lembaga pesantren menjadi salah satu lembaga yang tetap eksis dan survive dalam dinamika masyarakat, lembaga pesantren mampu bertahan dalam berbagai macam perubahan baik keadaan sosial, ekonomi maupun politik yang terjadi di Indonesia. Pesantren mampu bertahan mulai dari sebelum Indonesia merdeka atau saat zaman penjajahan sampai Indonesia berada di zaman reformasi hingga saat ini, bahkan jauh sebelum itu. Mengenai perkembangan lembaga pesantren ada beberapa peneliti seperti, Soegarda Poerbakawatja, dan Mahmud Yunus, mengatakan bahwa pesantren bukan berasal dari Hindu-Budha, melainkan melalui masuknya Islam di Indonesia (Karel Steenbrink, 1994).

Dalam konteks relasi antara politik dan pesantren, ada beberapa poin penting yang perlu diperhatikan untuk menelaah mengenai bagaimana keterlibatan lembaga pesantren dengan atmosfer politik. Pertama, adanya kelembagaan ulama atau kyai lewat pesantren, yang mana dalam artian kedudukan para ulama maupun kyai dalam lembaga pesantren sebagai basis dari institusi ulama dan kyai. Hal tersebut, didasarkan pada suatu realita bahwa dalam suatu lembaga pesantren, adanya peran dari seorang kyai atau ulama merupakan otoritas tunggal sekaligus sebagai contoh atau panutan dari pemahaman terkait ilmu dan ajaran keagamaan itu sendiri. Adanya peran ulama ataupun kyai dalam lembaga pesantren dianggap sebagai bridging (jembatan) ilmu yang diajarkan kepada santri-santrinya. Selain itu juga, keberadaan seorang kyai atau ulama dapat dilihat sebagai tokoh yang memiliki pengaruh untuk proses mobilisasi sosial masyarakat tertentu. Kedua, mengenai kedudukan lembaga pesantren di tengah perkembangan sosial masyarakat. Kedudukan pesantren di tengah masyarakat didukung dengan realita yang ada, bahwa kedudukan seorang kyai atau ulama dari kalangan pesantren selalu mendapatkan kepercayaan dan tempat strategis dalam kehidupan sosial masyarakat, sehingga seorang kyai memiliki wibawa dan selalu dihormati. Seorang kyai selalu memiliki otoritas yang cukup besar sehingga berpengaruh di lingkungannya, khususnya di kalangan lembaga pesantren. Mulai dari perkataan hingga sikap hidup yang dilakukan oleh para kyai ataupun ulama di suatu lembaga pesantren bahkan di luar pesantren mampu mempengaruhi pola hidup masyarakat. Dalam hal inilah mengapa peran dari seorang ulama atau kyai sangat penting dalam pesantren, karena dapat menjadi agen proses interaksi dan intensifikasi dalam kehidupan pesantren maupun dalam bermasyarakat.

Keberadaan dan eksistensi lembaga pesantren menunjukkan perkembangan yang cukup baik dan menyebar secara pesat ke seluruh penjuru daerah di Indonesia. Salah satu lembaga pesantren yang tetap survive dan memiliki peran serta eksistensi di kalangan masyarakat nasional, yakni Lembaga Pesantren Raudlatut Thalibin, yang berada di

Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah. Lembaga Pesantren Raudlatut Thalibin, merupakan salah satu lembaga pesantren yang keberadaannya terus berkembang, beradaptasi dan melakukan transformasi dalam dinamika kehidupan sosial politik yang terjadi di Indonesia. Lembaga Pesantren Raudlatut Thalibin merupakan lembaga pendidikan Islam, yang didirikan pada tahun 1942, saat masa penjajahan Jepang. Pesantren Raudlatut Thalibin juga menjadi pusat pembelajaran agama Islam kepada warga pesantren dan masyarakat sekitar pesantren, dengan melaksanakan agenda ceramah agama dengan harapan, keberadaan Lembaga Pesantren Raudlatut Thalibin membawa manfaat dan teras bagi kehidupan masyarakat. Lembaga Pesantren Raudlatut Thalibin didirikan oleh seorang ulama/kyai kharismatik yang cukup terkenal di Indonesia, khususnya di daerah Rembang sendiri, beliau adalah K.H. Bisri Mustofa. Beliau seorang ulama atau kyai yang juga aktif berkecimpung dalam kehidupan politik nasional pada masanya. Sepeninggal KH. Bisri Mustofa, lembaga pesantren Raudlatut Thalibin dipimpin dan dikelola oleh ketiga putra beliau yakni, KH. Cholil Bisri, KH. M. Adib Bisri serta KH. Mustofa Bisri. Walaupun pimpinan lembaga pesantren Raudlatut Thalibin berganti, namun eksistensi lembaga pesantren Raudlatut Thalibin tetap ada dalam masyarakat, karena selalu mampu berdinamika dan beradaptasi dengan segala perubahan maupun perkembangan kehidupan sosial-politik nasional.

Peran Kyai dalam lembaga pesantren sangat penting dalam proses pengajaran ilmu agama, sosok kyai dianggap memiliki pengaruh kuat bagi kehidupan sosial-politik di kehidupan sosial masyarakat. Kemampuan survival pesantren di tengah perkembangan dan perubahan kondisi sosial-politik di Indonesia, salah satunya sangat ditentukan oleh peran dari seorang kyai sebagai top figur lembaga pesantren. Eksistensi lembaga pesantren tak luput dari peran seorang pengampu atau pemimpin di dalam lembaga pesantren. Adanya proses transformasi yang dilakukan oleh lembaga pesantren di suatu wilayah yang berlangsung di tengah masa pembangunan dewasa ini, telah mampu membuat lembaga pesantren melebur di setiap sudut kehidupan masyarakat. Lembaga pesantren yang selama ini sering dipandang sebagai lembaga yang tradisional, ternyata mampu memiliki kemampuan adaptif yang cukup tinggi dalam upaya mempertahankan eksistensinya di tengah perubahan dan perkembangan dinamika politik. Kemampuan lembaga pesantren yang adaptif tersebut, membuat lembaga pesantren berhasil mempertahankan eksistensinya, dan berhasil menunjukkan keberhasilannya dalam menempuh perjalanan transformasi yang ditempuhnya (Purwo Santoso, 1988). Begitu juga dengan lembaga pesantren mampu melakukan transformasi sosio-kultural terhadap masyarakat, tanpa mengubah dan menghilangkan identitas diri pesantren sendiri. Kemampuan tersebut yang akhirnya dapat memberi jawaban terhadap tantangan perkembangan dalam pendidikan dan formasi nilai-nilai sosial serta perubahan dinamika politik nasional. Dengan begitu lembaga pesantren, khususnya pesantren Raudlatut Thalibin bisa terus survive dalam dinamika sosial politik nasional hingga saat ini.

Dengan begitu, penelitian ini mengambil objek Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin dilatar belakangi oleh tiga hal, pertama Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin telah berhasil mempertahankan keberadaannya di tengah dinamika sosial politik mulai sebelum Indonesia merdeka, orde lama, orde baru, reformasi, hingga saat ini. Kedua, Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin memiliki aktor-aktor yang aktif berkiprah dalam kehidupan politik, baik politik struktural (politik praktis) maupun politik kultural. Ketiga, belum ada penelitian yang membahas kemampuan survival Pesantren Raudlatut Thalibin secara fundamental. Sejalan dengan hal tersebut, sehingga penelitian ini akan membahas mengenai relasi antara lembaga pesantren dan politik, bagaimana kemampuan survival

pesantren dalam dinamika sosial politik di Indonesia. Melalui penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan bagaimana kemampuan survival pesantren dalam konteks perkembangan dan perubahan kondisi sosial politik nasional dan bagaimana kiprah kiai pesantren dalam kehidupan sosial politik. Berdasarkan topik permasalahan yang akan diteliti, maka metode yang relevan sehingga dapat digunakan dalam penelitian kali ini adalah menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan suatu metode dalam penelitian yang bertujuan untuk memahami suatu masalah atau fenomena tertentu. Metode ini juga dapat menjelaskan mengenai apa dan bagaimana yang dialami oleh objek-subjek penelitian, serta menggunakan cara deskriptif. Jenis metode kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan studi kasus, yakni meneliti fenomena tertentu yang dilakukan secara mendalam baik mengenai suatu individu, suatu kelompok atau organisasi tertentu, suatu lembaga atau institusi, dan sebagainya yang terjadi didalam masyarakat.

Mengingat penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan pendekatan ilmu politik untuk menguraikan topik permasalahan mengenai kemampuan survival pondok pesantren dalam dinamika sosial politik di Indonesia, maka teori yang cukup relevan yang dapat digunakan untuk menjelaskan judul tersebut adalah dengan menggunakan teori new institutionalism dan didukung oleh teori politik kultural (Cultural Theory). Teori New institutionalism merupakan salah satu teori yang menjelaskan tentang bagaimana memahami jalannya suatu lembaga dengan menggunakan pendekatan kelembagaan baru dalam mempelajari aspek organisasi. konsep struktur new institutionalism yang paling mendasar adalah "institution" atau institusi, yang sesuai dengan aktivitas manusia yang stabil dan tangguh, oleh karenanya dapat bertahan dan relatif langgeng karena dianggap tepat oleh aktor terkait, khususnya aktor yang berkuasa. Sifat institusi yang mendapat legitimasi adalah bagian dari kekuatan suatu institusi. Sehingga dapat dipastikan kesesuaian (relatable) suatu institusi dengan masyarakat. (Meyer and Rowan, 1977). Dalam teori ini akan dapat menjadi pisau analisis dari jalannya suatu intitusi atau lembaga yang dapat bertahan, karena dipegang oleh actor yang tepat dan mendapat legitimasi yang kuat. Selain melalui teori new institutionalism kajian ini juga dapat dianalisis melalui teori politik kultural (cultural politik). Teori politik kultural ini menekankan pada peran aktor yang mampu mempengaruhi dan memobilisasi nilai-nilai di dalam masyarakat. Peran suatu lembaga dan aktor yang dimainkan melalui jalur politik kultural menjadi salah satu faktor pesantren mampu bertahan (survive) dalam waktu yang cukup lama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Data

Kemampuan survival Pesantren Raudlatut Thalibin dalam dinamika sosial politik di Indonesia menunjukkan perjalanan dan proses yang cukup panjang. Pada dasarnya peran pesantren tersebut sudah terjadi sejak masa sebelum Indonesia merdeka hingga saat ini. Berbagai cuaca dan kondisi sosial-politik di Indonesia nyatanya mampu dihadapi dan dilalui oleh lembaga pesantren. Peran pesantren di masyarakat sebagai lembaga pendidikan agama sekaligus salah satu lembaga yang dapat memberikan solusi dalam merespon problem yang terjadi di tengah masyarakat. Penyampaian pendidikan agama dan solusi tersebut seringkali dilakukan oleh seorang kiai yang notabene sebagai motor penggerak pesantren, dengan kemampuan otoritas dan kharismanya melalui tindakan dan bahasa agama. Pesantren salah satu lembaga yang masih mempertahankan nilai khas dan ciri tradisionalnya, namun tetap mampu menerima adanya modernisasi maupun pembaharuan baik itu dalam ranah pendidikan maupun sosial. Dalam menyikapi

permasalahan yang ada di masyarakat, pesantren termasuk lembaga yang reseptif, responsif dan adaptif terhadap perkembangan pembangunan masyarakat, bahkan sebagian lembaga pesantren bersikap proaktif untuk ikut serta dalam dinamika perubahan yang ada. Pesantren juga merupakan subkultur, karena sistem yang ada dalam lembaga pesantren telah mengadopsi nilai-nilai yang berkembang di tengah masyarakat.

Sebagai subkultur, maka pergerakan dan perkembangan arah pesantren ditentukan tergantung dari kepemimpinan kyai yang memimpin lembaga pesantren. Menurut Manfred Ziemek, kemampuan, kecakapan dan kepribadian kyai menjadi pengaruh utama yang menentukan kaliber suatu lembaga pesantren, hal itu dikarenakan adanya otoritas dan kewenangan seorang kyai (Manfred Ziemek, 1986). Dengan begitu kyai memiliki peran yang sangat penting bagi kemampuan survival lembaga pesantren. Perkembangan pesantren tidak terlepas dari adanya peran dari sosok kyai. Peran kyai dengan otoritas dan kharismanya akan selalu dibutuhkan, karena kyai memiliki kekuatan dan kewenangan. Pada dasarnya Kyai menjadi salah satu kekuatan kepemimpinan slam yang dominan, karena dianggap telah berhasil memainkan perannya dari masa ke masa terhadap perkembangan keagamaan, sosial, kultural dan politik. Oleh karena itu perlunya menganalisis bagaimana tata kelola pesantren dan peran pesantren serta kyai dalam menghadapi tantangan untuk mengambil peluang dalam merespon perubahan yang ada. Sehingga suatu pesantren mampu untuk memiliki kemampuan survival dalam menghadapi dinamika sosial politik nasional. Khususnya Lembaga Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin, yang menjadi subjek dalam penelitian ini.

Sebagai lembaga pendidikan berbasis keagamaan, lembaga pesantren menjadi penting kedudukannya dalam rangka menginternalisasi nilai-nilai Islam melalui aktivitas pendidikan. Baik itu dalam pendidikan formal dalam bentuk madrasah kurikulum pemerintah, maupun madrasah kurikulum non-pemerintah dan pendidikan informal. Pengelolaan lembaga pendidikan di Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin sendiri, menggunakan sistem pendidikan formal dengan kurikulum non pemerintah, dan menggunakan pendidikan informal dalam bentuk pengajian atau kelompok kajian yang dilaksanakan secara rutin. Pesantren merupakan lembaga pendidikan yang proses penyelenggaraannya tidak lepas dari masyarakat, sehingga pesantren disebut sebagai Community Base Education (CBE). Dalam artian, lembaga pesantren memiliki hubungan interdependensi dengan masyarakat dalam sistem pesantren baik itu hasil input, proses, dan output dari pendidikan pesantren. Dengan begitu, pesantren bukanlah lembaga yang berdiri sendiri, tanpa adanya campur tangan dengan masyarakat namun ada relasi antara pesantren dan masyarakat. Sehingga kualitas dari pesantren tidak lepas dari pengaruh peran serta masyarakat, disisi lain kualitas masyarakat juga dipengaruhi oleh pesantren itu sendiri. Oleh karena itu pengelolaan lembaga pesantren sebagai lembaga sosial keagamaan dan masyarakat memiliki urgensi yang perlu diperhatikan. Pesantren sebagai lembaga pendidikan berbasis keagamaan dapat memberikan pelayanan kebutuhan masyarakat dalam bentuk dakwah yang dilakukan oleh para kyai pesantren. Hal itu dilakukan oleh Pesantren Raudlatut Thalibin dalam kegiatan pengajian rutin di setiap satu minggu dua kali, yakni di hari Selasa dan Jum'at. Dan juga mendirikan BWM (Bank Wakaf Mikro) Bangkit Nusantara, untuk membantu meningkatkan ekonomi masyarakat dengan memberikan modal usaha bagi mereka.

Pesantren jika dilihat dari perannya, maka peran pesantren tidak hanya sebatas sebagai suatu lembaga pendidikan saja atau lembaga bimbingan keagamaan. Namun, pesantren juga termasuk dalam konsep kemasyarakatan yang lebih luas, adanya pola interaksi antara pesantren dan masyarakat yang akhirnya membentuk suatu jaringan dan

consensus. Para kiai memiliki peran yang tidak bisa dihilangkan yakni peran dalam hal keagamaan kepada masyarakat, begitu pula dengan pesantren. Peran kiai dalam hal keagamaan dapat dilakukan oleh kiai tidak hanya melalui tindakan yang bersifat peribadatan seperti halnya imam sholat, mengaji dll. Namun lebih dari itu, sebagian kiai merasa terpanggil untuk melibatkan diri dalam organisasi sosial-keagamaan. Kiai-kiai di dalam Pondok Pesantren Pesantren Raudlatut Thalibin ikut serta berperan ke dalam Nahdlatul Ulama secara aktif, bahkan sebagian besar menjadi tokoh pusat Nahdlatul Ulama, seperti Gus Yaqut Cholil Qoumas sebagai Ketua Pusat GP Ansor, dan juga Gus Yahya Cholil Staquf yang menjadi Rais Aam PBNU. Hal tersebut juga dilakukan oleh pesantren-pesantren yang ada Indonesia, khususnya pesantren di daerah Jawa yang bermazhab Imam Syafi'i, memiliki hubungan yang kuat dengan Nahdlatul Ulama. Mereka menempatkan sikap akomodatif dengan budaya yang ada di masyarakat secara seimbang. Sehingga pesantren dapat melakukan peleburan dengan masyarakat secara baik. Peran pesantren dan kiai dalam ranah politik, kehadiran Kiai-kiai Pesantren Raudlatut Thalibin dalam dinamika politik diharapkan dapat memberikan kemanfaatan dan kedamaian. Disatu sisi adanya peran kiai dalam dunia politik diharapkan dapat mendinginkan panasnya kemelut dunia politik dan menjadi moral force dalam perjalanan politik pemerintahan di Indonesia. Disisi lain adanya peran kyai dalam politik, diharapkan masyarakat agar berperan lebih dalam, agar dapat membantu mengatasi persoalan atau krisis yang terjadi di Indonesia secara langsung. Secara historis, peran kiai-kiai Pesantren Raudlatut Thalibin dalam dinamika politik di Indonesia dapat dipahami bahwa, peran kiai dengan perjuangan sosial-politiknya tidak dapat dipisahkan, khususnya peran politiknya.

Secara teoritik kajian mengenai kemampuan survival pesantren memiliki link back, dan dapat diinterpretasikan dengan teori yang diangkat, yakni teori new institutionalism dan teori politik kultural. Dalam konsep teori new institutionalism lembaga akan dapat bertahan dan relatif langgeng jika dipegang oleh aktor yang tepat. Hal tersebut merupakan bagian dari konsep struktur kelembagaan (institutional structures) yang merupakan klasifikasi konsep dari teori new institutionalism. Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin memiliki aktor yang kuat dalam memimpin dan mengelola lembaga pesantrennya, yakni peran seorang kiai. Kiai-kiai yang berasal dari kalangan Pesantren Raudlatut Thalibin, ada KH. Bisri Mustofa, KH. Cholil Bisri, KH. Mustofa Bisri (Gus Mus), KH. Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), KH. Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut), KH. Bisri Cholil Laquf (Gus Ipul) dan KH. Hanies Cholil Barro' (Gus Hanies). Kiai-kiai yang berada di pesantren tersebut memiliki peran dalam kehidupan sosial dan politik di tingkat lokal dan nasional, mulai berdirinya pesantren hingga saat ini. Kiai-kiai tersebut, cukup dikenal oleh masyarakat nasional dan lokal karena kiprahnya dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Sehingga tidak heran jika Pesantren Raudlatut Thalibin memiliki kemampuan cukup baik dan kuat dalam mempertahankan keberadaannya dalam dinamika politik di Indonesia.

Dalam konsep struktur kelembagaan (institutional structures) ada tiga pilar atau komponen. Pertama adalah pilar normative (normative pillar). Yang mana dasar dasar legitimasi dari suatu lembaga adalah moral. Pilar normative juga berfokus pada pendekatan kekerabatan, sosial, kegamaan yang seringkali memiliki nilai-nilai yang sama. Kelembagaan pesantren juga didasarkan pada nilai dan moral yang berkaitan dengan peran seorang kyai dalam kehidupan sosial. Kiai-kiai dari Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin merupakan tokoh agama yang kharismatik yang berporos pada tindakan kepemimpinannya atau personal leadership. Dalam konteks tersebut, posisi kiai adalah sebagai patron bagi masyarakat (client), dapat dikatakan ada hubungan paternalistik antara kiai dan masyarakat. Kompetensi kiai-kiai yang berada di Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin,

telah menempatkan mereka sebagai pemegang otoritas keagamaan. Hal itu terjadi ketika kiai-kiai dari Pesantren Raudlatut Thalibin, memberikan ceramah dan nasihat kepada masyarakat. Sosok kiai disana seringkali dijadikan sebagai preferensi sosial-politik yang dipatuhi oleh masyarakat, terlepas dari adanya intervensi dari kiai-kiai. Bahkan dengan otoritas moral yang dimiliki oleh kiai, secara tidak langsung akan dapat memberikan pengaruh terhadap tindakan masyarakat dalam menentukan pilihan politiknya, tanpa ada tindakan represif dari kiai. Pemahaman masyarakat terkait peran kiai tentunya bersifat teologis-kharismatis. Pemahaman ini didasarkan pada masyarakat ketika hendak menentukan suatu tindakan atau keputusan seringkali mengikuti figur kiai. Karena apapun yang dikatakan dan dilakukan oleh kiai dijadikan sebagai rujukan dan barometer oleh masyarakat.

Kedua, dalam pilar regulatif (*regulative pillar*) yang mana didasarkan pada tindakan aktor yang dapat dinilai oleh masyarakat. Dalam artian, ada suatu limitasi terhadap peran kyai dalam dunia politik. Bagaimana seorang kyai memiliki batas-batas dan etika dalam melakukan kegiatan berpolitiknya, hal tersebut dapat didukung dengan adanya prinsip-prinsip yang dimiliki oleh kyai dalam melakukan tindakan dalam berpolitik. Kyai-kyai di Pesantren Raudlatut Thalibin pun memiliki prinsip dan etika tersebut, beliau-beliau memaknai politik segera etis dan menempatkan politik sebagai sarana untuk merealisasikan kemaslahatan masyarakat. Seringkali peran seorang kyai dalam dunia politik dianggap oleh masyarakat menjadi suatu hal yang kurang baik, karena dapat memperkeruh peran dari seorang kyai sebagai orang yang memiliki tanggung jawab dalam mengajarkan nilai-nilai keagamaan. Hal tersebut juga ditanggapi oleh kyai-kyai di Pesantren Raudlatut Thalibin bahwasannya, agama dan politik adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan karena setiap kehendak politik yang diputuskan harus dipertimbangkan melalui etika dan fiqh keagamaan sebagai dasar. Ketiga, pilar budaya-kognitif (*cultural-cognitive pillars*) yang mana dasar legitimasi dalam pilar ini adalah sesuatu yang dapat dikenali, didukung dan dipahami secara sosial. Hal ini dapat dilakukan oleh Pesantren Raudlatut Thalibin dengan nilai-nilai khas yang dimiliki oleh pesantren dan telah dikenali oleh khalayak umum. Sistem pendidikan dan tradisi pesantren melahirkan nilai-nilai yang compatible terhadap pembentukan budaya damai. Hal tersebut menjadi pengingat bahwa sistem pendidikan pesantren mengharuskan santri konsisten dengan ajaran agama, namun tetap inklusif dalam pemikiran keagamaan. Dalam artian para subjek yang berada didalam pesantren harus tetap menjaga tradisi pesantren, namun di sisi lain harus menghormati tradisi di luar pesantren. Harus istiqamah beribadah dan dakwah, namun di sisi lain harus mengedepankan tasamuh (toleran) dan mengapresiasi kearifan lokal dan keragaman masyarakat di sekitarnya.

Kemampuan survival sebuah lembaga juga berasal dari adanya legitimasi yang didapat. Legitimasi sebagai bagian dari kekuatan suatu lembaga dan juga merupakan konsep atribut (*attributes*) dari teori *new institutionalism* merupakan hal penting dalam lembaga. Legitimasi yang dibangun oleh Kiai dan Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin bersama masyarakat selalu dilakukan di segala ranah kehidupan, baik ranah sosial, politik, budaya dan ekonomi. Hal tersebut ditunjukkan melalui bentuk kerjasama dan sikap para kiai dengan pihak-pihak yang memiliki visi dan misi di jalan yang sama dengan pesantren. Pada dasarnya sebagian besar masyarakat Indonesia dikategorikan masyarakat yang memegang teguh nilai-nilai spiritualitas, religiusitas agama dan tradisi yang cukup kuat. Disisi lain, legitimasi dari kiai dan pesantren juga terjadi dari adanya pengakuan kelembagaan pesantren oleh negara atau pemerintah. Maka sangat relevan jika kekuasaan di negara ini tidak lepas dari pengaruh tokoh agama yakni sosok kyai. Kiai-kiai Pesantren

Raudlatut Thalibin dalam perannya mendapat tanggung jawab dan tuntutan moral secara horizontal terhadap kehidupan sosial masyarakat, karena seorang kiai memiliki integritas dan otoritas yang legitimate di mata masyarakat. Semakin kuat dan sentral peran kiai, maka semakin layak jika pesantren itu bisa dikatakan lembaga atau institusi. Proses legitimasi yang diterima oleh Pesantren Raudlatut Thalibin tersebut tidak datang dan bisa didapatkan begitu saja oleh para kiai, tapi legitimasi tersebut ditentukan oleh bagaimana kiprah kiai-kiai yang berada di pesantren tersebut dalam mengabdikan dirinya di kehidupan sosial masyarakat. Hal tersebut sudah dilakukan oleh kiai-kiai Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin dalam perannya di segala lini kehidupan masyarakat. Dengan begitu, adanya kiprah dan peran kiai dalam kehidupan masyarakat, dapat memperkuat kharisma yang dimilikinya. Bahkan ketokohan kiai dapat mengalahkan tokoh politik dalam sektor formal.

Adanya peran dari kiai-kiai Pesantren Raudlatut Thalibin dalam kepentingan sosial-politik, secara tidak langsung dapat membantu perkembangan dan pembangunan lembaga pesantren. Hal tersebut wajar dilakukan oleh kiai dalam politik, karena pada dasarnya ada interaksi antara kiai dan pihak lain yang bersifat *rational choices*. *Rational Choice Institutionalism* merupakan salah satu kategori dalam pendekatan *new institutionalism*, disamping itu ada dua kategori yang lain yakni *Sociological Institutionalism* dan *Historical Institutionalism*. Pertama, didalam *Rational Choice Institutionalism* adanya tradisi *behaviorism* yang menganggap interaksi manusia merupakan manifestasi dari adanya kepentingan individu. Sehingga dalam interpretasinya, segala tindakan dan kebijakan yang diputuskan oleh kiai untuk mencapai kepentingan masyarakat dan pastinya kepentingan mereka. Kedua, *Sociological Institutionalism* yang melihat bahwa suatu lingkungan yang meliputi nilai dan identitas, dapat mempengaruhi strategi dan pilihan aktor. Pada era modern ini, para kiai-kiai tidak bisa melakukan permainan politik menggunakan cara lama, hanya nunggu di pesantren saja. Namun kiai-kiai juga perlu melakukan penetrasi politik, agar keberadaan pesantrennya tidak dilibas oleh pusat kekuasaan yang memiliki kapasitas kontrol yang kuat. Keberadaan Pesantren Raudlatut Thalibin sebagai lembaga di tengah masyarakat, selalu dihadapkan oleh permasalahan pengakuan posisinya di dalam negara. Sehingga sesuai dengan regulasi yang ada, posisi Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin sudah diatur dalam Undang-Undang No. 18 tahun 2019 tentang Pesantren. Regulasi tersebut yang menjadi rekognisi dari keberadaan Pesantren Raudlatut Thalibin tersebut. Sekaligus menjadi pertanda adanya relasi yang terbangun antara lembaga pesantren dengan negara atau pemerintah secara tidak langsung. Di dalam regulasi tersebut, Lembaga pesantren diperbolehkan untuk melakukan proses belajar mengajar dan kegiatan jika mendapat izin operasional pondok pesantren. Ketiga, *Historical Institutionalism* yang menagatkan bahwa catatan sejarah untuk memahami fenomena institusi atau lembaganya. Kyai-kyai di Pesantren Raudlatut Thalibin seringkali menggunakan pertimbangan secara historis, dengan menggunakan pesan ataupun tindakan yang telah dilakukan oleh kyai-kyai yang dulu dalam melakukan suatu keputusan sosial politik.

Peran Lembaga Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin dalam dinamika politik nasional, tidak hanya dimainkan melalui jalur struktural saja, namun juga melalui jalur politik kultural. Selain diinterpretasikan melalui teori *new institutionalism* kajian ini juga dijelaskan melalui pendekatan politik kultural (*cultural politik*). Pendekatan kultural politik juga menekankan pada peran aktor yang mampu mempengaruhi dan memobilisasi nilai-nilai di dalam masyarakat. Peran pesantren dan kiai yang dimainkan melalui jalur politik kultural menjadi salah satu *factor* pesantren mampu bertahan (*survive*) dalam waktu yang

cukup lama. Melalui jalur politik struktural kiai-kiai dari Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin dapat mempengaruhi proses pembuatan kebijakan secara langsung. Melalui usaha untuk mencapai suara terbanyak dalam lembaga legislatif (DPR) dan pemerintahan. Sebagian kiai Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin berjuang melalui jalur politik struktural tersebut. Namun dari dua jalur tersebut, jalur politik kultural yang lebih utama dalam membuat Lembaga Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin mampu survive hingga saat ini. Jalur politik kultural yang dilakukan menjadikan keleluasan Pesantren Raudlatut Thalibin dalam berkiprah menjadi semakin tinggi, sehingga bisa menembus batas-batas institusional dalam memperjuangkan visi misi pesantren. Berdasarkan realitas kultural, kiai memiliki daya tarik dalam mempengaruhi masyarakat dan negara. Keberhasilan Lembaga Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin dalam proses pemberdayaan masyarakat tentu ditentukan kemampuan mendayagunakan basis kultural yang dimilikinya.

Dengan begitu, politik kultural dapat memberi pemahaman bahwa, dinamika politik tidak hanya dilihat dari hubungan konteks perebutan kekuasaan di tingkat negara, namun yang menjadi hal pokok adalah hubungan pada tingkat civil society. Dalam tindakan politik kultural, proses hegemoni menjadi hal yang penting, karena proses hegemoni yang dilakukan melalui mekanisme konsensus yang menekankan pada nilai-nilai kultural yang ada di dalam masyarakat. Proses hegemoni yang dilakukan oleh Pesantren Raudlatut Thalibin berada di ranah positif, karena untuk mempertahankan keberadaan pesantren para kiai menjalin hubungan yang baik bersama masyarakat, dengan nuansa kultural baik melalui aktivitas pendidikan, keagamaan dan kekeluargaan. Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin salah satu lembaga pendidikan Islam di Indonesia yang memiliki great tradition, karena sistem dan kurikulum yang diajarkan di Pesantren Raudlatut Thalibin selalu dipertahankan di tengah perubahan dan perkembangan zaman. Di sisi lain, pesantren juga merupakan lembaga pendidikan yang dapat memainkan peran dalam upaya pemberdayaan masyarakat (empowerment) dan transformasi sosial secara efektif.

Peran-peran yang dilakukan oleh pesantren dan para kiai itulah yang membuat keberadaan dan posisi Pesantren Raudlatut Thalibin sebagai lembaga pendidikan tradisional mampu bertahan (survive) sampai saat ini. Terjadinya proses adaptasi di Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin terhadap perkembangan dinamika sosial dan politik, tidak terjadi secara radikal atau menyeluruh. Sehingga nilai-nilai khas atau tradisi dan prinsip moral dari Pesantren Raudlatut Thalibin selalu dipertahankan. Dengan demikian, Lembaga Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin mampu berkembang hingga saat ini, dan perkembangannya tersebut hadir disebabkan karena adanya kemampuan survival pesantren, dan juga kemampuan adaptasi pesantren untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat. Kemampuan survival Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin dalam dinamika sosial politik Indonesia, juga sangat dipengaruhi oleh adanya para kiai yang ikut serta berperan di dunia politik struktural, lebih-lebih politik kultural. Serta adanya kemampuan Lembaga Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin untuk mendapatkan dan mempertahankan legitimasi masyarakat.

KESIMPULAN

Sebagaimana dikemukakan pada bab pertama bahwa penelitian ini akan menjawab mengenai kemampuan survival Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin dalam dinamika sosial politik di Indonesia. Sebagai lembaga yang seringkali dijuluki sebagai lembaga tradisional, pesantren ternyata mampu menunjukkan diri untuk melakukan adaptasi terhadap perubahan kondisi sosial dan politik yang ada. Pesantren melakukan kemampuan adaptasi dan daya survivalnya tanpa menghilangkan nilai-nilai khas yang sudah melekat

ditubuh pesantren dan tidak meninggalkan misi utamanya dalam hal pendidikan dan keagamaan. Pesantren Raudlatut Thalibin dan para kiai-kiai di dalamnya ikut serta mengalami euforia politik, sehingga sebagian para kiai tersebut ikut serta berperan dalam dunia politik baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Kiai-kiai Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin memiliki pilihan sendiri-sendiri dalam kiprahnya di dunia politik, ada yang memilih fokus untuk mengelola pesantren dan melakukan politik jalur kultural, sebagian memilih untuk ikut serta dalam politik secara langsung melalui jalur struktural.

Kemampuan survival pesantren tentu sangat dipengaruhi oleh kekuatan dari seorang kiai yang memimpin suatu pesantren. Kepemimpinan kiai-kiai Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin terus melakukan transformasi sosial, politik dan budaya. Secara sosial para kiai tersebut merupakan tokoh atau elite masyarakat yang secara tradisional seringkali menjadi barometer atau referensi masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Hal itu disebabkan adanya kemampuan dan pengalaman seorang kiai di ranah sosial maupun politik. Dengan bekal kemampuannya tersebut, akhirnya membuat kiai memiliki otoritas dan kharisma, yang membuat masyarakat menempatkan posisi kiai sebagai rujukan tindakan agama, sosial bahkan tindakan politik. Dalam rangka mempertahankan keberadaan pesantren, para kiai-kiai Pesantren Raudlatut Thalibin melakukan upaya-upaya sebagai berikut.

Pertama, upaya tata kelola pesantren. Tata kelola pesantren yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin, dengan cara mempertahankan sistem pendidikan atau pengajaran berbasis kurikulum mekah yang sudah ada sejak awal pesantren tersebut didirikan. Selain itu Pesantren Raudlatut Thalibin juga memberi kesempatan bagi santri untuk bisa mendapatkan pendidikan formal dengan kurikulum umum dari pemerintah. Pesantren Raudlatut Thalibin membuka ruang kepada masyarakat umum yang ingin menimba ilmu agama di pesantren, dengan memberikan pengajian rutin di setiap minggunya. Pendidikan dan pengajaran yang berada di pesantren, selalu mempertahankan nilai-nilai khas masyarakat setiap kegiatan dalam pesantren, seperti halnya nilai kerjasama, gotong royong, persaudaraan dan kekeluargaan. Pesantren Raudlatut Thalibin juga melakukan hubungan dengan masyarakat, dengan menjadikan pesantren sebagai lembaga sosial-keagamaan, lembaga pendidikan dan juga lembaga pemberdayaan masyarakat.

Kedua, upaya peran sosial-politik kiai dan pesantren. Peran kiai dalam ranah sosial membantu memecahkan persoalan yang dihadapi masyarakat dengan memberi solusi berdasarkan berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Kiai-kiai juga melakukan langkah nyata melalui berbagai tindakan riil yang menyentuh kehidupan masyarakat, baik itu pada aspek sosial, agama, ekonomi dan juga politik. Sebagai bentuk pengembangan lembaga pesantren, maka Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin Rembang selalu memperluas jaringan dan ruang lingkup dakwahnya. Hal tersebut dibuktikan dengan Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin Rembang melakukan kerjasama dengan beberapa pihak di luar Pondok Pesantren, seperti menjalin kerjasama dengan berbagai instansi baik dari institusi pemerintahan maupun swasta. Hal tersebut dilakukan melalui peran kiai-kiai dari Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin. Kiai-kiai disana selalu melakukan aktualisasi diri terhadap tuntutan kehidupan sosial-politik sesuai dengan perkembangan dan perubahan kondisi yang ada.

Dengan demikian kemampuan survival Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin dalam dinamika sosial politik nasional, dipengaruhi oleh adanya peran kiai-kiai itu sendiri baik itu secara struktural maupun kultural. Karena kiai lah yang menentukan arah gerak kendali pengelolaan suatu lembaga pesantren itu akan dijalankan. Apalagi di era modern seperti

saat ini, kiai-kiai di sana melakukan perannya secara maksimal untuk mempertahankan keberadaan pesantren, agar tidak disingkirkan oleh pusat kekuasaan yang memiliki kontrol lebih. Kemampuan survival pesantren juga didorong dari internal pesantren melalui peran kyai, dan juga eksternal pesantren melalui legitimasi dari masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Emmerson, Donald K. 1976. *Indonesia's Elite: Political Culture and Cultural Politics*. London: Cornell University Press.
- Endang, Turmudi. 2004. *Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan*. Yogyakarta: Lkis.
- Geertz, Clifford. 1960. *The Javanese Kijaji: The Changing Role of a Cultural Broker*. *Journal of Comparative Studies in Society and History*, Vo. 2, No. 2
- Mastuhu. 1994. *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren*. Jakarta: INIS.
- Meyer, John. and Brian Rowan. 1977. *Institutionalized organizations: Formal structure as myth and ceremony*. Reprinted in Walter W. Powell and Paul J. DiMaggio. 1991. *The New Institutionalism in Organizational Analysis*. Chicago: University of Chicago Press.
- Santoso, Purwo. 1989. *Politik Kultural Pesantren: Interaksi LSM / LPSM Pesantren dengan Pemerintah dalam Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta: FISIP, Universitas Gadjah Mada.
- Scott, W. Richard. 2001. *Institutions and Organization*. Thousand Oaks, California: Sage Publication.
- Steenbrink, Karel. 1994. *Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern*. Diterjemahkan oleh Abdurrahman. Jakarta: LP3IS.
- Ziemek, Manfred. 1986. *Pesantren dalam Perubahan Sosial*. Jakarta: P3M.